



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN VOKASI  
KOMISI X DPR RI  
KE KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021  
TANGGAL 29 S.D. 31 JANUARI 2021**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI terhadap Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perpustakaan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
11. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 174.
12. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 Januari 2021 tentang Rencana Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah dan melakukan pengawasan mengenai implementasi kebijakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta menggali dan menyerap aspirasi dari daerah.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual bidang pendidikan di Kabupaten Batang, dan kendala serta permasalahannya, termasuk langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan Dasar Menengah dan Vokasi ini meliputi relaksasi penggunaan dana BOS akibat pandemi *Covid-19*, Pendidikan Jarak Jauh, program bantuan kuota internet, persiapan Asesmen Nasional 2021, dan Pengembangan Pendidikan Vokasi.

## **D. Agenda Kunjungan Kerja**

Agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Batang adalah melakukan pertemuan dan dialog yang diikuti oleh:

1. Wakil Bupati Batang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Batang.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
5. Dewan Pendidikan Kabupaten Batang.
6. Pengurus PGRI Kabupaten Batang.
7. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Batang.
8. Perwakilan Kepala SMK di Kabupaten Batang.
9. Perwakilan Dunia Usaha dan Industri Kabupaten Batang.

## **E. Susunan Tim Kunjungan Kerja**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Dasar Menengah dan Vokasi Komisi X DPR RI ke Kabupaten Batang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. dan didampingi oleh Pejabat Mitra Kerja Komisi X DPR RI dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu Dr. Wartanto (Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud RI), Dr. Agus Salim (Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat), Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D. (Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat), dan Bapak Riki Perwakilan dari Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Tim ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

## II. ISI LAPORAN

### A. Identifikasi Data & Informasi

1. Dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal Guru dan Tenaga Kependidikan yang memadai dan berkualitas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang melakukan langkah:
  - a. Mengangkat tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) sebagai Guru Pengganti. Sebagai dasar pengangkatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada pasal 59 ayat 3, yaitu *“Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan”*.
  - b. Mengembangkan akses belajar di Kabupaten Batang dengan menyelenggarakan Layanan SMP Terbuka, SMP Satu Atap dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Guru dan Tenaga Kependidikan yang memadai dan berkualitas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang juga melakukan Pembinaan dan Pengembangan Guru berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008 sebagai berikut:
  - a. Pembinaan dan Pengembangan Profesi, untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
  - b. Pembinaan dan Pengembangan Karir, dalam bentuk penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
  - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara terencana, bertahap dan dianggarkan setiap tahun dari sumber dana APBD atau sumber lain melalui APBN.
  - d. Untuk akses di bidang Pendidikan yaitu dengan pembangunan, memperbaiki/ merehab, memelihara infrastruktur utama dan pendukung, sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan layanan pendidikan melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
3. Berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka mencapai efektifitas Pendidikan Jarak Jauh, akan tetapi menghadapi kendala, diantaranya:
  - a. Ketersediaan sarana dan prasarana, misalnya kesulitan sinyal dan keterbatasan kepemilikan HP android.
  - b. Daya tahan peserta didik dalam melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh semakin menurun hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa respon siswa semakin menurun mengikuti Pendidikan Jarak Jauh karena sudah jenuh.

- c. Dukungan orang tua/wali peserta didik sangat minim karena minimnya sumber daya manusia dan kesibukan memperoleh sumber kehidupan yang semakin sulit.
    - d. Kesiapan Guru dalam pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh harus diakui bahwa guru belum memiliki kompetensi yang cukup dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, sebab guru selama ini disiapkan untuk mengajar tatap muka.
4. Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi pembelajaran secara tatap muka di Kabupaten Batang diantaranya:
  - a. Sosialisasi pada satuan pendidikan terkait persiapan pembelajaran tatap muka.
  - b. Berusaha melengkapi fasilitas pendukung pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, seperti: kelengkapan cuci tangan dengan air mengalir (*washtafe*), masker, alat pengukur suhu, *faceshield* bagi guru.
5. Dalam APBD Kabupaten Batang, ada dana pendampingan dari APBD II untuk penguatan lembaga khususnya LKP sejumlah 16 lembaga dengan memberi anggaran Rp5 juta tiap lembaga sebagai upaya dalam mengembangkan pendidikan vokasi dan memfasilitasi instruktur agar memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian.
6. Upaya pengembangan pendidikan vokasi, terutama terkait ketersediaan pendidik, kualitas lulusan SMK dan keterlibatan dunia usaha dan industri, diantaranya:
  - a. Membantu guru produktif untuk memiliki sertifikat asesor kompetensi keahlian.
  - b. Memastikan adanya tunjangan profesi guru mata pelajaran produktif honorer di sekolah negeri yang sudah memiliki sertifikat pendidik.
  - c. Menambah literatur (buku bacaan) mata pelajaran produktif yang disediakan oleh Pemerintah dan dunia usaha /industri.
7. Dalam hal relaksasi penggunaan dana BOS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penjelasan, antara lain:
  - a. Relaksasi penggunaan dana BOS sangat membantu sekolah disaat mengalami kesulitan pembiayaan (terutama sekolah swasta).
  - b. Penggunaan relaksasi BOS dilaksanakan sesuai Permendikbud.
  - c. Anggaran BOS juga digunakan dalam pembelian dan pengadaan disinfektan, termogun, masker, sarana cuci tangan dan bantuan kuota untuk pembelajaran.
8. Mengenai bantuan kuota internet dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Batang telah mendistribusikan, namun terkendala beberapa hal, diantaranya:
  - a. Terdapat peserta didik yang tidak mendapatkan bantuan yang disebabkan karena Nomor Peserta Didik hangus.

- b. Peserta didik di daerah sulit sinyal tidak dapat memanfaatkan bantuan kuota secara optimal.
9. Mengenai Asesmen Nasional (AN) yang akan dilakukan pada tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang menyampaikan persiapan dengan skenario sebagai berikut:
- a. Persiapan Sarana dan Prasarana
    - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dan Satuan Pendidikan melakukan pemetaan sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan, untuk kemudian mencari solusi penyediaan bagi yang belum ada fasilitasnya. Untuk jenjang SMP sarana komputer tercukupi, sedangkan SD dari 459 satuan pendidikan baru 15 SD yang memiliki komputer untuk Asesmen Nasional.
    - 2. Disdikbud Kab Batang bekerjasama dengan Dsikominfo dan PT Telkom untuk memperoleh sambungan internet. Untuk bisa mengikuti Asesmen Nasional dengan lancar dibutuhkan jaringan internet yang cukup dan stabil. Untuk sekolah yang berada di daerah *blank spot* sedang diupayakan pemenuhan jaringan internet bekerjasama dengan Diskominfo dan Telkom.
  - b. Persiapan Kompetensi Siswa dan Pengelolaan Pembelajaran
    - 1. Sosialisasi Asesmen Nasional kepada satuan pendidikan.
    - 2. Pendataan satuan pendidikan dan peserta didik untuk kegiatan Asesmen Nasional.
    - 3. Satuan pendidikan melaksanakan sosialisasi Asesmen Nasional kepada peserta didik dan *stakeholder* sekolah.
    - 4. Satuan pendidikan menyiapkan Tim Sukses Asesmen Nasional, antara lain melakukan kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran.

## **B. Permasalahan dan Temuan**

Berdasarkan penjelasan, informasi dan masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan, terdapat beberapa permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Batang, antara lain:

- a. Problematika umum dalam pelaksanaan pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah rasa jenuh siswa, pendampingan orang tua yang minim (kemampuan dan waktu), serta keterbatasan perangkat (ketersediaan alat dan pulsa/kuota internet)
- b. Minimalnya penguasaan guru dan siswa dalam penggunaan aplikasi pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR).
- c. Sinyal internet yang tidak stabil dan merata dalam mengikuti *Video Conference* dan mengirim tugas kepada guru mata pelajaran.
- d. Kesulitan penilaian terutama dalam menentukan standar penilaian karena keterbatasan alat dan perangkat yang dimiliki siswa.
- e. Pembukaan sekolah dalam bentuk tatap muka masih dilakukan kajian oleh pemerintah daerah, khususnya oleh dinas pendidikan dan kebudayaan.

- f. Berdasarkan informasi dari organisasi profesi Guru di Kabupaten Batang memiliki permasalahan mengenai rasio guru di sekolah negeri yang tidak memadai, sehingga kehadiran guru honorer/wiyata bhakti memang sangat dibutuhkan.
- g. Perlunya tunjangan profesi guru bagi guru mata pelajaran produktif SMK yang masih berstatus honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidik.
- h. Perlu adanya program dari Pemerintah tentang kewajiban guru tamu dari DUDI supaya dapat *sharing* dengan guru mata pelajaran produktif dan memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik.

### **C. Pembahasan**

Selama berada di Kabupaten Batang, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan. Beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI antara lain:

1. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PJJ di masa pandemic, Dinas Pendidikan Kabupaten Batang melakukan upaya dan langkah, antara lain: a) melakukan sosialisasi kepada para guru terkait dengan PJJ, bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti Diskominfo dan PT Telkom; b) memfasilitasi hal-hal yang dikeluhkan masyarakat terkait dengan jaringan internet; c) memenuhi perlengkapan protokol kesehatan di sekolah; d) guru aktif mendatangi para siswanya yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses jaringan internet, sehingga dipastikan seluruh peserta didik tetap bisa mendapatkan materi pendidikan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Atas upaya dan Langkah tersebut, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mengapresiasi kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang juga mendapat dukungan penuh dari pimpinan DPRD Kabupaten Batang.
2. Mengenai program-program Kemendikbud RI seperti PIP (Program Indonesia Pintar), relaksasi BOS, pembukaan pembelajaran tatap muka dan Asesmen Nasional, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan koordinasi dengan Kemendikbud RI agar program-program tersebut dapat berjalan dengan lebih maksimal.
3. Mengenai pengembangan pendidikan vokasi, kalangan DUDI agar memperluas kesempatan bagi guru produktif SMK untuk magang, dan Pemerintah Daerah memfasilitasi untuk membuat MoU kerja sama untuk pelatihan dan penempatan kerja bagi lulusan SMK.
4. Mengenai permasalahan guru honorer, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa Komisi X telah membentuk Panitia Kerja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN, dan berharap seluruh organisasi profesi guru turut aktif memberikan masukan kepada Panitia Kerja.

#### **D. Usulan dan Masukan**

1. Kemendikbud RI agar lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi tentang Asesmen Nasional (AN) agar mudah dipahami masyarakat.
2. Kemendikbud RI agar mengeluarkan regulasi mengenai Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk memperkuat kinerja dan kelebagaannya.
3. Mengharapkan agar Surat Keputusan bagi guru Tenaga Honorer yang telah lulus menjadi PPPK segera dikeluarkan oleh Pemerintah.
4. Seleksi satu juta guru honorer untuk menjadi PPPK yang akan dilakukan pada tahun 2021 agar *grade*-nya diturunkan dan ada kebijakan afirmatif bagi guru honorer yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun.
5. Kemendikbud RI agar memberikan bantuan sarana prasarana Pendidikan, terutama bagi sekolah swasta dan bantuan revitalisasi SMK.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi di atas dan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Dasar Menengah dan Vokasi Komisi X DPR RI ke Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum kondisi dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Batang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama cukup baik, termasuk program-program dari Kemendikbud RI seperti penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), penggunaan relaksasi BOS, sosialisasi Asesmen Nasional (AN) telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dalam hal konten kurikulum adaptif, pemerintah Kabupaten Batang memandang masih perlu dievaluasi kembali. Selain itu, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19, antara lain penguasaan penggunaan aplikasi, kurangnya kreatifitas pengajaran, dan adanya kejenuhan belajar siswa, serta keterbatasan sarpras IT dalam mendukung kelancaran Pembelajaran Jarak Jauh.
2. Mengenai persiapan pembukaan Sekolah Tatap Muka, Pemerintah Kabupaten Batang telah melaksanakan sosialisasi pada satuan pendidikan dan komite sekolah dalam rangka pemenuhan fasilitas pendukung pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, dan merancang skenario terbaik teknis pelaksanaan guna meminimalisir terjadinya kasus baru dari kluster sekolah. Adapun mengenai keputusan pembukaan sekolah tatap muka, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu; sekolah telah mampu melaksanakan protokol kesehatan, ada persetujuan orang tua, dan ada persetujuan dari komite sekolah.
3. Mengenai persiapan Asesmen Nasional, di Kabupaten Batang telah dilakukan sosialisasi dan pendataan, satuan pendidikan juga telah menyiapkan Tim Sukses Asesmen Nasional. Tim ini bertugas untuk melakukan upaya

peningkatan kualitas pembelajaran, meskipun sedikit terhambat karena pembelajaran PJJ sehingga sulit mencapai kompetensi siswa yang ideal.

4. Mengenai pengembangan pendidikan vokasi, satuan pendidikan berharap agar kalangan DUDI memperluas kesempatan bagi guru produktif SMK untuk magang di industrinya, dan pemerintah daerah memfasilitasi untuk membuat MoU kerjasama untuk pelatihan bagi peserta didik dan penempatan kerja bagi lulusan SMK.

#### **IV. REKOMENDASI**

1. Mendorong Kemendikbud RI untuk membantu pembangunan sarana prasarana pendidikan, khususnya bagi sekolah swasta, seperti Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi gedung sekolah, dan perbaikan sarana MCK sekolah.
2. Mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi secara berkala mengenai penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19, khususnya dalam hal pengaturan pembelajaran tatap muka dan kurikulum yang adaptif dengan kondisi geografis/psikis siswa dan guru.
3. Mendorong Kemendikbud RI untuk membuat kebijakan afirmasi terkait kriteria masa pengabdian guru sebagai faktor pertimbangan diterimanya Guru dan Tenaga Kependidikan Honorar menjadi ASN.
4. Mendukung Kemendikbud RI untuk membantu penguatan revitalisasi SMK berupa fasilitasi *Center of Excellence* di SMK yang potensial di Kabupaten Batang.

#### **V. PENUTUP**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Dasar Menengah dan Vokasi Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang telah disampaikan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini pada rapat-rapat Komisi X dan menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Dasar Menengah dan Vokasi Komisi X DPR RI ke Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan.

Jakarta, 1 Februari 2021

**Ketua Tim,**

  
Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.  
A-444